

ABSTRAK

Setiap manusia membutuhkan tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi kelangsungan hidupnya. Karena berbagai faktor, terkadang manusia rela tinggal di daerah yang rawan bencana seperti longsor. Kecamatan Patamuan merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman yang termasuk kawasan yang rawan bencana longsor. Salah satu peristiwa longsor yang banyak mengakibatkan kerugian dan jatuhnya korban adalah peristiwa longsor yang terjadi pasca gempa bumi tanggal 30 september 2009. Longsor yang terjadi di tiga Korong yaitu Korong Lareh Nan Panjang, Korong Lubuk Laweh, dan Korong Pulau Air. Tercatat 262 orang tertimbun hidup-hidup oleh material longsor di Nagari Tandikat ini dan 340 keluarga kehilangan tempat tinggal.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menghimbau masyarakat yang bermukim di lokasi rawan bencana longsor, khususnya di Kecamatan Patamuan untuk tidak bermukim di kawasan longsor. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan adalah dengan cara relokasi permukiman untuk kawasan rawan bencana longsor. Oleh karena itu, permasalahan yang muncul adalah bagaimana preferensi masyarakat yang bermukim pada kawasan rawan bencana longsor terhadap rencana relokasi permukiman mereka. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji persepsi dan preferensi masyarakat kawasan rawan bencana longsor terhadap rencana relokasi permukiman dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di kawasan rawan longsor di Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman. Identifikasi kawasan rawan longsor berdasarkan peta kerentanan gerakan tanah Kecamatan Patamuan meliputi Korong Lareh Nan Panjang, Lubuk Laweh, Pulau Air, Sarang Gagak, Galoro, dan Korong Lubuk Aro. Sampel KK diambil acak dari keenam Korong sebanyak 78 KK. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan panduan kuesioner, sedangkan analisis data secara deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa masyarakat yang bermukim di kawasan rawan longsor di Kecamatan Patamuan lebih dipengaruhi oleh faktor ikatan pekerjaan dan faktor ikatan sosial budaya. Terkait dengan rencana relokasi permukiman dari kawasan rawan bencana longsor mayoritas masyarakat lebih memilih untuk direlokasi di dalam lingkup Kecamatan Patamuan atau dalam lingkup Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan untuk rencana relokasi berupa transmigrasi lokal ke Kabupaten Sijunjung, Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Darmasraya lebih banyak masyarakat yang tidak setuju daripada yang setuju ikut relokasi berupa transmigrasi lokal (53,95% tidak setuju dan 46,05% responden setuju ikut transmigrasi lokal). Masyarakat yang setuju untuk ikut rencana program relokasi berupa transmigrasi lokal umumnya mereka sudah tidak memiliki lagi tanah untuk dijadikan lahan bercocok tanam dan berharap agar program transmigrasi lokal ini secepat mungkin direalisasikan, tidak setuju untuk ikut rencana program relokasi berupa transmigrasi lokal karena mereka tidak ingin kehilangan status kepemilikan tanah yang merupakan warisan turun temurun dan berharap agar adanya program relokasi permukiman mereka dalam lingkup Kecamatan Patamuan atau dalam lingkup Kabupaten Padang Pariaman

Kata Kunci : preferensi, relokasi permukiman, bencana longsor